



► PROYEK BUKIT DERMO

Rekanan Baru Kembalikan Uang Rp800 Juta

BANTUL—Rekanan proyek pembangunan Agrowisata Bukit Dermo yang gagal menyelesaikan proyek telah mengembalikan uang senilai Rp800 juta.

Jumali
jumali@harianjogja.com

Adapun, besaran uang yang dikembalikan masih kurang. Semestinya kontraktor asal Kota Jogja tersebut membayar sebanyak Rp1,05 miliar.

“Untuk batas akhir pengembalian Februari. Kontraktor gagal diberi waktu dua bulan untuk mengembalikan uang sesudah putus kontrak awal Desember 2024,” kata Pelaksana Tugas Inspektur Inspektorat Bantul, Hermawan Setiaji, Senin (20/1).

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Bantul itu menyebutkan Pemkab Bantul masih terus menunggu rekanan gagal itu untuk mengembalikan semua besaran uang penalti sampai batas akhir yang ditetapkan.

Selain itu, Pemkab juga telah memasukan nama rekanan tersebut dalam daftar hitam. Rekanan itu tidak boleh mengikuti proses tender proyek pengadaan barang dan jasa yang diadakan semua organisasi perangkat daerah (OPD) selama satu tahun ke depan.

Mengenai kelanjutan proyek Bukit Dermo. Pemkab fokus pada

- Aset yang mudah bergerak dibawa ke kantor karena rawan diambil orang.
- Pemkab memilih fokus pada rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

pengamanan aset. Dinas Pariwisata (Dispar) Bantul sebagai yang memimpin proyek kini telah mengamankan aset yang mudah bergerak di kawasan Bukit Dermo.

“Aset yang mudah bergerak dibawa ke kantor karena rawan diambil orang. Lalu, ada bangunan yang belum sempurna yang jika dibiarkan kena hujan akan rusak. Karena itu, harus dituntaskan agar bangunan yang ada tidak tambah rusak,” ungkap Hermawan.

KSO

Menurut Hermawan, sejak pemutusan kontrak, akses ke pembangunan kawasan Bukit Dermo telah ditutup. Selain itu, saat ini pembangunan di kawasan tersebut juga terhenti. “Tergantung nanti kebijakan baru. Jika mau diteruskan nanti tergantung kesiapan anggaran,” ucap Hermawan.

Terkait dengan pemeriksaan atas keterlibatan orang di Dispar mengenai gagalnya pembangunan proyek tersebut, Hermawan mengaku sampai saat ini belum dilakukan. Pemkab memilih fokus pada rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul Hanung Raharjo menyayangkan gagalnya

pembangunan kawasan Agrowisata Bukit Dermo yang mendapatkan kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp5,7 miliar.

“Ke depan jangan sampai terjadi lagi. Mekanisme pemilihan rekanan harusnya lebih selektif. Oke lah harga jadi pertimbangan tapi kualitas dan kelayakan harus jadi pertimbangan juga. Belum tentu harga murah akan terselesaikan,” tuturnya.

Terkait dengan penyelesaian pembangunan kawasan Agrowisata Bukit Dermo, Hanung mengaku masih menunggu koordinasi dari Pemkab, termasuk kemungkinan penggunaan APBD Perubahan untuk menyelesaikan pembangunan kawasan tersebut.

Sekretaris Daerah Bantul Agus Budiraharja mengungkapkan setelah adanya putus kontrak, Pemkab selanjutnya akan menganalisa kondisi Agrowisata Bukit Dermo dan apa yang dilakukan ke depan.

Sejauh ini ada dua opsi untuk penyelesaian masalah tersebut. Opsi pertama, APBD Perubahan 2025 bisa dianggarkan untuk menyelesaikan pembangunan tahap pertama Agrowisata Bukit Dermo. Opsi kedua mengundang investor untuk kerja sama operasional (KSO).